

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian bab kajian pustaka ini, dikemukakan teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan topik penelitian.

2.1.1 Audit Internal

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal

Pengertian Audit Internal menurut Hery (2017:238) adalah :

“Audit internal adalah suatu fungsi penelian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penelian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan - kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen.”

Amin Hiro Tugiman (2014:11) menjelaskan bahwa audit internal adalah sebagai berikut:

“*Internal Auditing* atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.”

Adapun Menurut Sukrisno Agoes (2017:238) menjelaskan tentang audit internal sebagai berikut:

“Internal Audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”.

Berdasarkan ketiga pernyataan di atas dapat di simpulkan, bahwa Audit Internal adalah keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi dan pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penelian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan - kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya. Seorang pemeriksa internal pun harus memiliki rasa independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi.

2.1.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Audit Internal juga memiliki tujuan audit internal menurut Hiro Tugiman (2018:255) mengatakan bahwa :

“Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Pemeriksaan internal melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”.

Menurut Hery (2016:281), tujuan utama pemeriksaan internal adalah sebagai berikut:

1. Untuk meyakinkan keandalan informasi.
2. Untuk memastikan kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk meyakinkan perlindungan terhadap harta.
4. Untuk meyakinkan penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien,
5. Untuk meyakinkan pencapaian tujuan.

2.1.1.3 Tahap Pelaksanaan Audit Internal

Tahap Pelaksanaan Audit Internal dapat di pakai sebagai tolak ukur bagi para pelaksana pemeriksa. menurut Hiro Tugiman (2014:53-75) pelaksanaan tugas audit internal sebagai berikut :

1. Perencanaan Audit

Sebagai langkah awal perencanaan audit ini berisikan:

- a) Menyusun tujuan dan lingkup audit
- b) Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang akan diaudit
- c) Menentukan sumber-sumber penting dalam melakukan audit
- d) Memberitahukan kepada auditor mengenai pelaksanaan audit
- e) Melaksanakan atau tepatnya survey terhadap risiko, pengendalian untuk mengetahui luas audit yang akan dilaksanakan dan meminta komentar dan saran audit
- f) Menyusun program
- g) Menentukan bagaimana, kapan dan siapa yang membutuhkan hasil dari audit pengesahan rencana audit

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi Untuk melakukan pengujian dan pengevaluasian auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit.
3. Menyampaikan hasil pemeriksaan Auditor internal harus menyampaikan atau melaporkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil audit.
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Pemeriksaan internal harus terus meninjau atau melakukan follow up untuk memastikan bahwa terdapat temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.

2.1.1.4 Indikator Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2006:53), tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan audit
2. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi
3. Tahap penyampaian hasil audit
4. Tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

penjelasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Audit Audit intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi:
 - a. Peroleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa.
 - b. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.

2. Tahap Pengujian dan Pengevaluasian Informasi Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:
 - a. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja.
 - b. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi.
3. Tahap Penyampaian Hasil Pemeriksaan Audit intern harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu:
 - a. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu.
 - b. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan.
4. Tahap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, atautkah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

2.1.2 Manajemen Risiko

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda milik perusahaan atau apapun, hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko.

Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di

sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staff, dan organisasi).

Menurut Irham Fahmi (2010 : 2) Manajemen Risiko adalah :

“Suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komperhensif dan sistematis.”

Sedangkan menurut Darmawi (2014) Manajemen Risiko adalah :

“Manajemen Risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.”

Menurut (Djohanputro, 2008:43) menjelaskan bahwa Manajemen Risiko

adalah sebagai berikut:

“Manajemen Risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko.”

Berdasarkan ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa Manajemen Risiko adalah tahap identifikasi risiko yang secara sistematis dan terus menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan resiko.

2.1.2.2 Manfaat Manajemen Risiko

Menurut Irham Fahmi (2010 : 3) dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu:

- A) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- B) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- C) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari segi finansial.
- D) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- F) Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan (*sustainable*).

2.1.2.3 Proses Proses Dalam Manajemen Risiko

Proses-proses dalam manajemen risiko menurut Anonim (2008: 273)

adalah:

1. *Plan Risk Management Planning* – menetapkan bagaimana pendekatan dan rencana aktivitas pengelolaan risiko pada proyek.
2. *Risk Identification* – menentukan risiko yang mana yang mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristik/sifat-sifatnya.
3. *Qualitative Risk Analysis* – melakukan analisa kualitatif risiko dan kondisi/syarat-syarat untuk prioritas pengaruhnya terhadap kinerja proyek.
4. *Quantitative Risk Analysis* – mengukur peluang dan konsekuensi risiko dan estimasi implikasinya terhadap kinerja proyek.
5. *Risk Response Planning* – mengembangkan prosedur dan teknik untuk mempertinggi kesempatan dan mengurangi ancaman terhadap sasaran proyek.
6. *Risk Monitoring and Control* – memonitor sisa risiko, identifikasi risiko yang baru, melaksanakan rencana merespon risiko, dan menghitung efektifitasnya selama umur proyek.

2.1.2.4 Indikator Manajemen Risiko

Proses Pengelolaan Risiko untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan (Mamduh M. Hanafi, 2014:10), yaitu :

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Banyak risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, mulai dari risiko penyelewengan oleh karyawan, risiko kejatuhan meteor atau komet, dan lainnya. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misal dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan.

2. Evaluasi dan Pengukuran Risiko

Langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk ‘mengukur’ risiko tersebut.

3. Pengelolaan Risiko

Setelah analisis dan evaluasi risiko, langkah berikutnya adalah mengelola risiko. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius, misal kerugian yang besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan (*retention*), diversifikasi, atau ditransfer ke pihak lainnya. Erat kaitannya dengan manajemen risiko adalah pengendalian risiko (*risk control*), dan pendanaan risiko (*risk financing*).

2.1.3 *Good Corporate Governance*

2.1.3.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Bambang Rianto Rustam (2017:294) adalah :

“*Corporate Governance* merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. *Corporate governance* menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memerhatikan kebutuhan stakeholder, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah”.

Menurut Muh. Arief Effendi (2016:3) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan”.

Adapun Daniri (2014:5) menjelaskan tentang *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

“GCG merupakan struktur dan proses (peraturan, sistem dan prosedur) untuk memastikan prinsip TARIF bermigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memerhatikan keseimbangan kepentingan *stakeholders* yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketiga pernyataan di atas dapat di simpulkan, bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisariat/dewan pengawas, dan direksi) yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan dalam upaya mengurangi resiko dan tercapainya tujuan perusahaan termasuk dalam hal pengamanan aset. GCG juga dapat mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memerhatikan keseimbangan kepentingan *stakeholders*.

2.1.3.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Muh. Arief Effendi (2016:7) *good corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik.
2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

2.1.3.3 Indikator *Good Corporate Governance*

Menurut Sukrisno Agoes (2009:104) mengemukakan bahwa lima prinsip GCG, yaitu:

- a. Transparansi (*transparence*)
- b. Akuntabilitas (*accountability*)
- c. Responsibilitas (*responsibility*)
- d. Independensi (*Independency*)
- e. Kesetaraan (*fairness*)

Penjelasan dari lima prinsip tersebut sebagai mana yang tertuang dalam pedoman *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparansi adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas adalah :

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).
3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip responsibilitas adalah sebagai berikut:

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip independensi adalah sebagai berikut:

- A. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- B. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip kesetaraan adalah sebagai berikut:

- A. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

- B. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- C. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2.1.3.4 Penilaian *Good Corporate Governance*

Penilaian GCG dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat aspek Dewan Direksi. Karena ukuran dewan direksi merupakan salah satu bagian dari mekanisme *Corporate Governance* yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan, (Panky Pradana. S & Rahardja : 2014).

Dalam pedoman *good corporate governance* tidak dinyatakan secara jumlah atau komposisi dari direksi, namun demikian jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan, (Luthfilia dan Dini : 2015).

Perusahaan yang menerapkan prinsip GCG akan memperlakukan para pesaingnya sebagai mitra bisnis yang setara, sehingga dapat tercapai *win-win solution* (Lilis Puspitawati, 2009:39).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian.

Penerapan GCG berfungsi sebagai pengatur hubungan-hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. GCG mengupayakan pencegahan dini atas kesalahankesalahan signifikan yang terjadi dalam mengimplementasikan strategi perusahaan dan upaya perbaikannya. GCG merupakan suatu alat untuk mengawasi pengelolaan manajer bahwa mereka bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan.

2.2.1 Implementasi Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance*

Menurut (Mas Ahmad Daniri 2014 : 158) menyatakan bahwa :

“Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki persyaratan sendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor internalnya adalah terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin mungkin akan terjadi”.

Menurut (Zarkasyi, 2008 : 184) berpendapat bahwa:

“Audit Internal berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi GCG dimana [yaitu] semakin tinggi peran audit internal maka akan semakin mendukung kinerja implementasi GCG.”

Dari hasil penelitian terdahulu dari Rismawati , Muh. Yusuf Q , A. Rezeki Asriani 2015 yang berjudul “Internal Audit Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT.FIF Cabang Palopo” mengatakan bahwa penelitian ini mampu di buktikan secara parsial, bahwa peranan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good corporate governance*.

Hasil penelitian dari Tedi Rustendi 2018 yang berjudul “Fungsi Audit Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Governance*” mengatakan Dari hasil analisis penelitian audit internal mempunyai peranan yang memadai dalam mendukung *good corporate governance*.

2.2.2 Implementasi Manajemen Risiko terhadap *Good Corporate Governance*

Menurut (Drew Kendrick, 2005:33) menyatakan bahwa :

"Manajemen risiko merupakan unsur yang ikut menentukan keberhasilan penerapan GCG di dalam suatu perusahaan. Saat penerapan manajemen risiko membaik, perusahaan akan menambah control risiko pada *core competence* dan *competitive advantage*, maka hubungan antara manajemen risiko dan GCG akan semakin akurat."

Menurut (Permatasari dan Novitasary : 2014) berpendapat bahwa :

“Implementasi GCG yang diproksikan dengan struktur kepemilikan akan berpengaruh terhadap manajemen risiko, dijelaskan lebih lanjut bahwa komitmen yang tinggi dari top management dan seluruh jajaran organisasi terkait implementasi GCG dapat menekan risiko akibat penyaluran kredit kepada masyarakat.”

Dari hasil penelitian terdahulu dari Yana Ayu Pradana 2014 yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Terhadap *Good Corporate Governance*” menyatakan bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko yang baik dan benar akan mendukung mewujudkan *Good Corporate Governance*.

Penelitian dari Winda Hestiecia 2013 yang berjudul “Manajemen Risiko Dalam Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Hubungannya Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus PT XTEL)” mengatakan bahwa pada penelitian ini secara simultan Manajemen risiko berpengaruh terhadap prinsip *Good corporate Governance* (GCG) dan berpengaruh pada kinerja perusahaan.

Penelitian lain dari Yana Ayu Pradana, Brady Rikumahu 2014 yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Asuransi” yang menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan unsur terpenting dalam mewujudkan GCG dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh perusahaan.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti mengajukan Hipotesis Deskriptif sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Penerapan Audit Internal Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kota Bandung Belum Optimal.
- H₂ : Penerapan Manajemen Risiko Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kota Bandung Belum Optimal.
- H₃ : Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kota Bandung Belum Optimal.